

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- AP. Parlindungan, 2003, *Beberapa Masalah Dalam UUPA*, Mandar Maju, Bandung.
- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana, Jakarta.
- Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan. Jakarta.
- Dessy Anwar, 2001., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Abdi Tama, Surabaya
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan (Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana)*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif (Diterjemahkan Oleh Raisul Muttaqien)*, Nusa Media, Bandung.
- Jayadi Setiabudi, 2013, *Panduan Lengkap Mengurus Tanah serta Segala Perizinannya*, Buku Pintar, Yogyakarta.
- Lexi J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosyda Karya. Bandung.
- Muchtar Wahid, 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Republika, Jakarta.
- Muhammad Yamin, dan Abd. Rahim Lubis A, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- 
- B, 2004, *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Otje Salman, 2004, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Rafika Aditama. Jakarta.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rudi Indrajaya, 2020, *Notaris dan PPAT (Suatu Pengantar)*, Cet. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung.
- Sahnan, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto A, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, B, 2006, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo A, 2014, *Teori Hukum: Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, B, 2011. *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Suhatri, 1982, *Buku Tuntunan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Yayasan Hudaya Bina Sejahtera, Jakarta,.
- Sunarjati Hartono, 1978, *Beberapa Pemikiran Kearah Pembaharuan Hukum Tanah*, Alumni, Bandung.
- Supriadi, 2016, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sustiyadi, 1997, *Beberapa Bahan Pemikiran Penyusunan Rencana PP Tentang Pengelolaan Tanah Negara*, Penerbit Badan Pertanahan Nasional RI, Jakarta.
- Urip Santoso A, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, Hkm. 102
- \_\_\_\_\_, B 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Prenanda Group, Jakarta.
- Wantijk Saleh, 1982 *Hak Anda Atas Tanah, Jakarta*, Ghalia Indonesia. Jakarta
- Winahyu Erwiningsih dan Fakhriya Zalili Sailan, 2018, *Mengurai Benang Kusut Hak Ulayat*, Inteligencia Media, Malang.
- Zaunuddin Ali, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Jurnal**

Dian Aries Mujiburohman, 2016, *Problematika Pengaturan Tanah Negara Bekas Hak Yang Telah Berakhir*, Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, Vol. 2 No. 2 November 2016.

Julius Sembiring, 2011, *Tanah Dalam Perspektif Filsafat Hukum*. Jurnal Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 2, Juni 2011.

## **C. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian HAK/DPAT tahun 2023

## **D. Internet**

Hapusnya Hak Atas Tanah di akses di [landdiary.blogspot.com/2009/12/hapusnya-hak-atastanah.html](http://landdiary.blogspot.com/2009/12/hapusnya-hak-atastanah.html). tanggal 11 Desember 2023 pukul 21.30 WIB

<https://www.agamkab.go.id/agamkab/profil> Kabupaten Agam dalam Angka tahun 2022